



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KOTA TARAKAN

WALI KOTA TARAKAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, perlu mengatur dalam Pedoman Organisasi Kemasyarakatan di Kota Tarakan;
- b. bahwa dalam rangka terciptanya ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta monitoring dan evaluasi keberadaan Ormas melalui pelaporan dan pendaftaran keberadaan Ormas di Kota Tarakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tarakan tentang Pedoman Organisasi Kemasyarakatan di Kota Tarakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5958);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TARAKAN TENTANG PEDOMAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KOTA TARAKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Bakesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan.
4. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
5. Surat Keterangan Terdaftar yang selanjutnya disingkat SKT adalah dokumen yang diterbitkan oleh Menteri yang menyatakan Ormas tidak berbadan hukum telah terdaftar pada administrasi pemerintahan.
6. Pendaftaran adalah proses pencatatan terhadap Ormas yang tidak berbadan hukum untuk pencatatan dalam administrasi pemerintahan dengan persyaratan tertentu untuk diberikan SKT oleh Pemerintah yang diselenggarakan oleh Menteri.
7. Surat Keterangan Lapor yang selanjutnya disingkat SKL adalah surat yang dikeluarkan Bakesbangpol Kota Tarakan sebagai bukti Ormas telah Lapor.
8. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Ormas.
9. Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Ormas.
10. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai acuan pedoman pelaporan keberadaan Ormas yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturannya Peraturan Wali Kota ini agar keberadaan Ormas di Daerah dapat terdektesi dan untuk meningkatkan pengawasan, Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan Ormas.

Pasal 3

- (1) Ormas dapat berbentuk :
 - a. badan hukum; dan
 - b. tidak berbadan hukum.
- (2) Pengaturan Ormas berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ormas yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbasis anggota atau tidak berbasis anggota.

Pasal 4

- (1) Ormas yang berbadan hukum dan/atau yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat memiliki struktur kepengurusan berjenjang atau tidak berjenjang.
- (2) Struktur kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam AD/ART Ormas.

BAB II

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 5

Ormas berkewajiban:

- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat;
- d. menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat;
- e. melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan
- f. berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara

Pasal 6

Ormas dilarang:

- a. menggunakan bendera atau lambang yang sama dengan bendera atau lambang negara Republik Indonesia menjadi bendera atau lambang Ormas;
- b. menggunakan nama, lambing, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambing, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;

- c. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas;
- d. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
- e. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.
- f. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
- g. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
- h. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- i. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- j. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. mengumpulkan dana untuk partai politik; dan/atau
- m. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

BAB III TATA CARA PENDAFTARAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Ormas tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) ayat (1) huruf b dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan SKT.
- (2) SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (3) SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib diperpanjang.
- (4) Pendaftaran Ormas dilakukan melalui tahapan:
 - a. pengajuan permohonan;
 - b. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen Pendaftaran; dan
 - c. penerbitan Surat Keterangan Laporan atau penolakan permohonan Pendaftaran.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Permohonan

Pasal 8

- (1) Pendiri Ormas mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis kepada Menteri Dalam Negeri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia melalui unit layanan administrasi Kementerian dengan tembusan kepada Wali Kota.
- (2) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui Wali Kota pada unit layanan administrasi di daerah yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tarakan.
- (3) Permohonan pendaftaran melalui Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tembusan kepada Wali Kota.
- (4) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan dan ditandatangani oleh pendiri dan pengurus Ormas.
- (5) Dalam hal pendiri meninggal dunia atau berhalangan tetap, permohonan pendaftaran Ormas dapat diajukan dan ditandatangani oleh pengurus Ormas.

Pasal 9

- (1) Pengajuan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dilakukan dengan melampirkan persyaratan :
 - a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris yang memuat AD atau AD dan ART;
 - b. program kerja;
 - c. susunan pengurus;
 - d. surat keterangan domisili sekretariat Ormas;
 - e. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Ormas;
 - f. surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan; dan
 - g. surat pernyataan kesanggupan Laporkan kegiatan.
- (2) Selain persyaratan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ormas melampirkan :
 - a. formulir isian data Ormas;
 - b. surat pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan Partai Politik;
 - c. surat pernyataan bahwa nama, lambang, bendera, and gambar, simbol, atribut, dan cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain serta bukan merupakan milik Pemerintah;
 - d. rekomendasi dari kementerian yang melaksanakan urusan di bidang agama untuk Ormas yang memiliki kekhususan bidang keagamaan;
 - e. rekomendasi dari kementerian dan/atau perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan untuk Ormas yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan
 - f. surat pernyataan kesediaan atau persetujuan dari pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan/atau tokoh masyarakat yang bersangkutan, yang namanya dicantumkan dalam kepengurusan Ormas.
- (3) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c ditandatangani oleh ketua dan sekretaris Ormas atau sebutan pengurus lainnya.

Pasal 10

- (1) AD dan ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a memuat paling sedikit :
 - a. nama dan lambang;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. asas, tujuan, dan fungsi;
 - d. kepengurusan;
 - e. hak dan kewajiban anggota;
 - f. pengelolaan keuangan;
 - g. mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal; dan
 - h. pembubaran organisasi.
- (2) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c paling sedikit terdiri atas:
 - a. ketua atau sebutan lain;
 - b. sekretaris atau sebutan lain; dan
 - c. bendahara atau sebutan lain.
- (2) Seluruh pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan anggota Ormas berkewarganegaraan Indonesia.
- (4) Kelengkapan dokumen susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup :
 - a. biodata pengurus organisasi, yaitu ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lainnya;
 - b. pas foto pengurus organisasi berwarna, ukuran 4 x 6 (empat kali enam), terbaru dalam 3 (tiga) bulan terakhir;
 - c. foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik pengurus organisasi; dan
 - d. surat keputusan tentang susunan pengurus Ormas secara lengkap yang sah sesuai dengan AD/ART Ormas.
- (5) Surat keterangan domisili sekretariat Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, dikeluarkan oleh lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya.
- (6) Surat keterangan domisili sekretariat Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat lampiran :
 - a. bukti kepemilikan, atau surat perjanjian kontrak atau ijin pakai dari pemilik/pengelola; dan
 - b. foto kantor atau sekretariat Ormas, tampak depan yang memuat papan nama.

Bagian Ketiga Tata Cara Pemeriksaan Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Pendaftaran

Pasal 11

- (1) Bakesbangpol Kota Tarakan memeriksa kelengkapan permohonan Pendaftaran.
- (2) Dalam hal permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi kelengkapan :
 - a. Bakesbangpol melakukan pencatatan dalam daftar registrasi permohonan; atau
 - b. Petugas unit layanan administrasi Kota Tarakan, melakukan pencatatan dan membuat tanda terima permohonan.
- (3) Dalam hal permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi kelengkapan, berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan kelengkapan permohonan pendaftaran yang telah memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dilakukan melalui pemeriksaan keabsahan dokumen Pendaftaran.
- (2) Untuk pengajuan permohonan pendaftaran melalui Bakesbangpol Kota Tarakan, dan pemeriksaan keabsahan dokumen Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Wali Kota melalui Kepala Bakesbangpol Kota Tarakan.
- (3) Hasil pemeriksaan keabsahan dokumen Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam formulir keabsahan dokumen.
- (4) Formulir keabsahan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan surat pengantar dari Kepala Bakesbangpol Kota Tarakan, dikirimkan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (5) Pengiriman formulir keabsahan dokumen Pendaftaran dan surat pengantar dari Kepala Bakesbangpol Kota Tarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat disampaikan melalui pos atau media elektronik.
- (6) Bakesbangpol Kota Tarakan melakukan pencatatan hasil pemeriksaan dokumen Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam daftar registrasi permohonan.

Pasal 13

Wali Kota melalui Bakesbangpol menyampaikan permohonan pendaftaran kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk penerbitan/penolakan Keterangan Terdaftar.

BAB III KEWAJIBAN LAPOR

Pasal 14

- (1) Pengurus Ormas yang berbadan hukum dan/atau yang tidak berbadan hukum, Laporkan keberadaan kepengurusannya di daerah kepada Pemerintah Daerah melalui Bakesbangpol dengan melampirkan SKT dan kepengurusan di daerah.
- (2) Pelaporan Ormas yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki struktur kepengurusan tidak berjenjang, dilakukan oleh pengurus Ormas sesuai dengan domisili sekretariatnya.

Pasal 15

- (1) Dalam hal permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diterima oleh Kepala Bakesbangpol Kota Tarakan atas nama Wali Kota menerbitkan Surat Keterangan Laporan.
- (2) Dalam hal permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditolak oleh Kepala Bakesbangpol Kota Tarakan atas nama Wali Kota menerbitkan surat penolakan dengan disertai alasan penolakan.
- (3) Dalam penerbitan Surat Keterangan Laporan atau penolakan permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Wali Kota dapat berkoordinasi dengan kementerian/ lembaga sesuai dengan bidang Ormas.
- (4) Penerbitan Surat Keterangan Laporan atau surat penolakan permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan oleh Wali Kota melalui Bakesbangpol Kota Tarakan kepada pemohon.

- (5) Penerbitan Surat Keterangan Laporan atau penolakan permohonan Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditembuskan kepada Wali Kota di wilayah domisili sekretariat Ormas.

Pasal 16

- (1) Surat Keterangan Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, memuat :
- a. nomor Surat Keterangan Laporan;
 - b. nama organisasi;
 - c. alamat organisasi;
 - d. masa berlaku Surat Keterangan Laporan;
 - e. nama instansi yang menerbitkan; dan
 - f. nama dan tanda tangan pejabat.
- (2) Surat Keterangan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas dengan ukuran F4.
- (3) Penulisan Surat Keterangan Laporan dengan menggunakan jenis huruf bookman old style dengan huruf 12 (dua belas).
- (4) Surat Keterangan Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Kepala Bakesbangpol Kota Tarakan atas nama Wali Kota Tarakan.
- (5) Masa berlaku Surat Keterangan Laporan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.

Pasal 17

Format formulir isian data Ormas, formulir keabsahan dokumen, Surat Pernyataan, Surat Keterangan Laporan dan petunjuk pengisian Surat Keterangan Laporan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

TATA CARA PERPANJANGAN DAN PERUBAHAN SKT

Pasal 18

- (1) Pengurus Ormas dapat mengajukan permohonan perpanjangan SKT Ormas untuk SKT Ormas yang telah berakhir masa berlakunya kepada Menteri Dalam Negeri melalui Rekomendasi Bakesbangpol Kota Tarakan atas nama Wali Kota.
- (2) Pengajuan permohonan perpanjangan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlaku SKT.

Pasal 19

Pengurus Ormas harus mengajukan perubahan SKT apabila terjadi perubahan nama, bidang kegiatan, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan/atau alamat Ormas.

Pasal 20

- (1) Permohonan perubahan SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditandatangani oleh pengurus Ormas dan dilengkapi bukti pendukung.
- (2) Permohonan perubahan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan kepada Menteri Dalam Negeri atas Rekomendasi Bakesbangpol Kota Tarakan atas nama Wali Kota.
- (3) Permohonan perubahan SKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan melalui Wali Kota pada Bakesbangpol Kota Tarakan.

Pasal 21

Tata cara pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13, berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen permohonan perubahan SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 22

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak permohonan perubahan SKT dicatat dalam daftar registrasi permohonan perubahan SKT oleh Bakesbangpol Kota Tarakan atas nama Wali Kota menerbitkan atau menolak penerbitan rekomendasi perubahan SKT.
- (2) Penerbitan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Wali Kota melalui Bakesbangpol Kota Tarakan kepada pemohon.
- (3) Penerbitan atau penolakan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditembuskan kepada Wali Kota di wilayah domisili sekretariat Ormas.

Pasal 23

Perubahan SKT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, tidak mengubah masa berlaku SKT yang telah diterbitkan sebelumnya.

Pasal 24

Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyimpan dokumen kelengkapan permohonan, perpanjangan dan perubahan SKT Ormas yang diajukan melalui Bakesbangpol Kota Tarakan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB V

PELAPORAN KEGIATAN ORMAS

Pasal 25

- (1) Ormas menyampaikan laporan perkembangan organisasi dan kegiatan organisasi setiap 6 (enam) bulan sekali yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya kepada Wali Kota
- (2) Laporan kegiatan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. nama dan jenis kegiatan;
 - b. tempat dan waktu kegiatan; dan
 - c. hal-hal lain yang dianggap perlu.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Wali Kota melalui Bakesbangpol Kota Tarakan melakukan pembinaan dan pengawasan Pendaftaran Ormas yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum di wilayah Kota Tarakan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Ormas melalui fasilitasi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

- (3) Dalam melakukan pemberdayaan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
- a. selaras dengan program perencanaan pembangunan nasional dan/atau program perencanaan pembangunan daerah; dan
 - b. menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

BAB VII SANKSI

Pasal 27

- (1) Setiap Ormas yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian bantuan dan/atau hibah;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. rekomendasi pencabutan SKT atau pencabutan status badan hukum.
- (2) Sebelum menjatuhkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah terlebih dahulu melakukan upaya persuasif.
- (3) Upaya persuasif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
- a. pemanggilan pengurus Ormas untuk dimintai klarifikasi;
 - b. menyampaikan kepada Ormas bahwa pelanggaran yang dilakukan merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. meminta kepada Ormas untuk tidak mengulangi pelanggaran;
 - d. meminta pengurus Ormas untuk menjaga ketertiban umum serta persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. meminta kepada Ormas untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan dalam rangka pembinaan, koordinasi, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, supervisi, dan konsultasi dan pendaftaran Ormas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:

- a. SKT yang telah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya;
- b. SKL yang telah diterbitkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya Ormas.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Ketentuan mengenai pelaporan, pendaftaran dan tata cara perpanjangan SKT dan SKL Ormas di Kota Tarakan berlaku mutatis mutandis terhadap pelaporan, pendaftaran dan tata cara perpanjangan SKT dan SKL Ormas di Kota Tarakan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 14 September 2020

WALI KOTA TARAkan,


KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 14 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TARAkan,


A. HAMID

BERITA DAERAH KOTA TARAkan TAHUN 2020 NOMOR 333

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TARAkan NOMOR 40 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN DI KOTA TARAkan

KOP DINAS

SURAT KETERANGAN

Nomor :

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;

2. Menimbang :

Setelah mempelajari dan memperhatikan permohonan dari sebagaimana angka 1 huruf b di atas yang diajukan kepada Kepala Bakesbangpol Kota Tarakan oleh selaku, maka dengan ini memberikan Surat Keterangan Telah Laporkan Keberadaan Ormas Kepada :

Nama lembaga :
Alamat :
No. Telp./Hp. :
Program Kegiatan :

Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan tanggal Apabila dikemudian hari Surat Keterangan ini terdapat kekeliruan dan/atau terjadi penyalahgunaan akan ditinjau kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tarakan,

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Tarakan

.....

KOP SURAT ORMAS

SURAT
PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
Jabatan :
Nomor KTP/SIM/Identitas lainnya :

2. Nama :
Jabatan :
Nomor KTP/SIM/Identitas lainnya :

Dengan ini menyatakan bahwa :

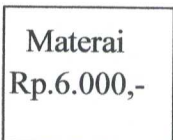
- a. Tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik tertentu
- b. Tidak terjadi Konflik Kepengurusan.
- c. Nama, Lambang, bendera, Tanda Gambar, symbol, Atribut, Cap Stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau Hak Cipta pihak lain.
- d. Bersedia menertibkan Kegiatan pengurus, dan/atau anggota organisasi
- e. Bersedia menyampaikan laporan perkembangan dan kegiatan organisasi setiap 6 (enam) bulan sekali.
- f. Bertanggungjawab terhadap keabsahan dan keseluruhan isi, data dan informasi dokumen/berkas yang diserahkan, dan
- g. Tidak akan melakukan penyalahgunaan SKT

Demikian pernyataan dibuat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sadar tanpa tekanan/paksaan dari pihak manapun, bertanggungjawab dan bersedia dituntut secara hukum sebagai akibat dari pernyataan ini

.....,20....

Ketua,

Sekretaris,



.....

.....

KOP SURAT ORMAS

FORMULIR ISIAN

Nama Organisasi	:	(diisi sesuai dengan nama ormas yang tertuang dalam Anggaran Dasar)
Bidang Kegiatan	:	(diisi sesuai dengan bidang bidang kegiatan ormas)
Ruang Lingkup	:	(diisi sesuai dengan ruang lingkup ormas)
Kategori Ormas	:	(berbasis mass/tidak berbasis massa/nirlaba)
Alamat Kantor/Sekretariat	:	(sesuai domisili ormas)
Tempat dan waktu pendirian	:	(tempat pendirian dan waktu pendirian ormas sesuai akta notaries atau status)
Asas Ciri Organisasi	:	(tidak bertentangan dengan Pancasila)
Tujuan Organisasi	:	
Visi dan Misi Organisasi	:	
Nama Pendiri	:	
Nama Pembina	:	(jika ada)
Nama Penasehat	:	(jika ada)
Nama Pengurus	:	
Ketua/Sederajat	:	
Sekretaris/Sederajat	:	
Bendahara/Sederajat	:	
Masa Bhakti Kepengurusan	:	(sesuai dengan Surat Keputusan Ormas)
Keputusan Tertinggi Organisasi	:	(sesuai dengan Anggaran Dasar)
Usaha Organisasi	:	(jika ada)
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	
Unit/cabang/sayap otonom organisasi	:	
Lambang/Logo Organisasi*)	:	
		<div>Lambang/Logo Ormas</div>
Bendera Organisasi*)	:	
		<div>Bendera Ormas</div>
Email/Website	:	

Ket : *) file dalam format jpeg/jpg dan dimasukkan ke dalam CD

KOP PERANGKAT DAERAH

FORMULIR KEABSAHAN DOKUMEN

1. Nama Organisasi : (diisi sesuai dengan nama ormas yang tertuang dalam Anggaran Dasar)
2. Nama Notaris : (diisi sesuai dengan akta pendirian)
3. Nomor dan Tgl Akta Notaris : (diisi sesuai dengan akta pendirian)
4. Nomor dan Tgl Surat Permohonan : (disertai perihal surat)
5. Bidang Kegiatan : (diisi sesuai dengan bidang kegiatan ormas)
6. Program Kerja Ormas : (diisi sesuai dengan program kerja ormas)
7. Alamat Kantor/Sekretariat : (sesuai domisili ormas)
8. Tempat dan waktu pendirian : (tempat pendirian dan waktu pendirian ormas sesuai akta notaris)
9. Asas Ciri Organisasi : (tidak bertentangan dengan Pancasila)
10. Tujuan Organisasi :
11. Nama Pendiri : (nama, NIK, agama, kewarganegaraan, jenis kelamin, tempat, tanggal lahir, status perkawinan, alamat, nomor telpon/HP, pekerjaan)
12. Nama Pembina : (jika ada)
13. Nama Penasehat : (jika ada)
14. Biodata Pengurus :
15. Ketua/Sebutan lain : (nama, NIK, agama, kewarganegaraan, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, status perkawinan, alamat, nomor telpon/HP, pekerjaan).
- a. Sekretaris/Sebutan lain : (sda)
- b. Bendahara/Sebutan lain : (sda)
16. Masa Bhakti Kepengurusan : (sesuai dengan Surat Keputusan Ormas)
17. Keputusan Tertinggi Organisasi : (sesuai dengan Anggaran Dasar)
18. Unit/Cabang : (disebutkan jumlah dan sebaran cabang)
19. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): (atas nama Ormas)
20. Sumber Keuangan : (berasal dari dalam negeri/luar negeri)
21. Lambang/logo Organisasi : (dilampirkan berwarna)
22. Bendera Organisasi : (foto dilampirkan berwarna)

Pejabat Pemeriksa

Nama
Pangkat
NIP.

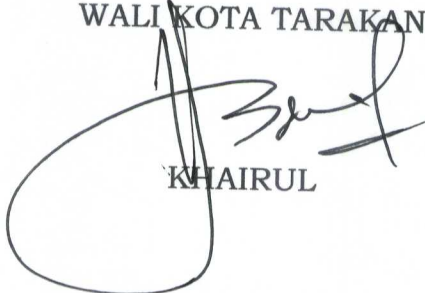
(tempat pengajuan),
tanggal/bulan/tahun)

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kota Tarakan,

Ttd

Nama
Pangkat
NIP.

WALI KOTA TARAKAN,



KHAIRUL